

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan ekonomi, atau diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product/ Gross National Product* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Djojohadikusumo (1994) membedakan konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurutnya pertumbuhan ekonomi berfokus pada peningkatan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, yang didasari oleh paham Neo-Klasik dan Neo-Keynes. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Namun demikian pada umumnya para ekonom memberikan pengertian sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang (Arsyad, 1999).

Teori – teori mengenai pertumbuhan yang sudah dikenal luas salah satunya adalah teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow. Teori ini dibuat sebagai respon atas model Harrod-Domar yang mengasumsikan rasio capital-output konstan. Model Solow mendefinisikan fungsi produksi yang memiliki sifat bahwa faktor-faktornya saling bersubstitusi secara kontinu, dan diasumsikan tiap faktor produksi mengalami *diminishing return*. Solow memulai dengan membentuk fungsi produksi

$$Y = F(K, L) \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana Y adalah output yang merupakan fungsi dari jumlah kapital K dan tenaga kerja L. Solow mengasumsikan fungsi produksi ini merupakan *constant return to scale*, yang berarti bahwa jika semua input dinaikkan dengan pengalihan tertentu, output akan naik dengan pengalihan yang sama.

Teori Pertumbuhan Lewis (dalam Todaro, 2003) menjelaskan transformasi struktur perekonomian dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern. Menurutnya, perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor tradisional pertanian yang tingkat produktivitasnya rendah dan sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Perhatian utama dari model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern.

Karena pada umumnya tolok ukur dari pembangunan ekonomi adalah tingkat pertambahan produk domestik bruto seperti telah di jelaskan sebelumnya, maka hal ini membuat pembangunan di negara-negara berkembang berorientasi pada mengejar pertumbuhan yang tinggi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan nasional melalui pertumbuhan pendapatan nasional (PDB), walaupun harus melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya strategi ini ternyata tidak menjamin adanya pemerataan distribusi pendapatan nasional bahkan lebih banyak merugikan masyarakat bawah karena hasil pembangunan lebih terkonsentrasi pada sekelompok orang saja. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengangguran, urbanisasi desa-kota, marginalisasi kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Paradigm pembangunan seperti di atas yang hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi perlu dikaji ulang kembali karena terbukti hanya akan menghasilkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan makin memperparah terjadinya kerusakan lingkungan.

Adalah Kuznets (1955) yang berupaya mengkritisi model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya,

pembangunan tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hanya akan menciptakan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam beberapa periode sebelumnya justru akan terkikis oleh efek-efek negatif dari pertumbuhan itu sendiri. Analisis Kuznets tentang pengaruh kelestarian lingkungan hidup terhadap pertumbuhan ekonomi ini secara teoritis diungkapkan dengan munculnya teori *Environmental Kuznets Curve* (EKC). Teori *Environmental Kuznets Curve* (EKC) menyatakan bahwa untuk kasus di negara sedang berkembang seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan industri dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Sebaliknya untuk negara maju, seiring dengan perjalanan waktu dalam kegiatan industrinya, maka kelestarian lingkungan hidup semakin bisa dijamin keberadaannya. Berdasarkan pada penemuannya tersebut, bentuk kurva EKC adalah huruf U terbalik (Munasinghe, 1999).

2.2. Konsep Perubahan Struktural

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomiansi wilayah tersebut. Secara sederhana perubahan struktur perekonomian dapat dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap pendapatan nasional. Dari sumbangan masing-masing sektor tersebut, perekonomian dapat dibagi menjadi tiga komponen, perekonomian dengan struktur primer atau agraris, perekonomian dengan struktur sekunder atau industry, dan perekonomian dengan struktur tersier atau jasa (Amir Hidayat, 2004).

Pembangunan harus dapat menghasilkan perubahan struktural yang seimbang yang tidak menimbulkan ketimpangan antar sektor perekonomian dan membentuk perekonomian yang sehat yaitu perekonomian yang mampu menjaga kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kwik Kian Gie, 2002). Perubahan structural terus terjadi pada perekonomian Indonesia, akan tetapi perubahan yang terjadi justru menghasilkan ketimpangan antar sektor yang kemudian menumbuhkan struktur ekonomi yang rapuh, struktur ekonomi yang dapat dengan mudah dipengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi disuatu sektor tanpa dapat digantikan oleh sektor lainnya. Sebagai contoh, pembangunan industri yang kurang memperhatikan dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam

dengan bijak justru dengan mudah bisa tergoyang oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dunia luar. Secara umum struktur perekonomian suatu negara dapat dibagi dalam tiga sektor yaitu sektor pertanian atau sektor primer, sektor industri atau sekunder dan sektor jasa atau tersier. Dari pengalaman sejarah di negara-negara maju, terlihat bahwa tahap awal pembangunan ekonomi di negara tersebut kontribusi sektor pertanian sangat dominan, namun akan terus menurun sampai pada tahap tertentu. Peran dominan sektor pertanian ini akan digantikan oleh sektor industri atau jasa. Fenomena perubahan seperti ini disebut sebagai proses transformasi struktural (Todaro, 2006).

Transformasi struktural menurut Todaro dan Smith (2004) yaitu proses perubahan struktural dasar industri dalam suatu perekonomian agar kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan nasional menjadi lebih tinggi daripada kontribusi sektor pertanian. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai perubahan peran sektor pertanian ke sektor industri. Teori perubahan struktural (*structural-change theory*) memusatkan perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang lebih modern serta memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh W.Arthur Lewis yang terkenal dengan model teoritisnya tentang “surplus tenaga kerja dua sektor” (*two sector surplus labor*) dan Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang “pola-pola pembangunan” (*patterns of development*) (Todaro dan Smith, 2000). Perubahan struktur ekonomi tidak saja melihat perubahan persentase penduduk yang bekerja di sektor-sektor dalam perekonomian tetapi juga dengan melihat perubahan kontribusi berbagai sektor terhadap pembentukan output.

Perubahan struktural melibatkan pergeseran utama antara sektor yang membuat sisi output pada persamaan fungsi produksi. Salah satu pola yang jelas dalam perubahan struktur perekonomian adalah sejalan dengan meningkatnya pendapatan perkapita, kontribusi (*share*) sektor industri terhadap pembentukan produk domestik bruto juga meningkat (Malcom Gillis et al, 1987).

Syrquin (1988) menyebutkan struktur yang sering digunakan dalam pembangunan dan sejarah ekonomi mengacu pada pentingnya sektor-sektor

perekonomian dalam hal produksi dan faktor-faktor yang digunakan. Industrialisasi disebut sebagai pusat proses dari perubahan struktural. Dalam hal ini (struktur sebagai komposisi dari agregat) perubahan struktur juga diterapkan pada agregat lainnya yang telah membawa proses industrialisasi seperti permintaan (*demand*) dan perdagangan. Proses yang saling berhubungan dari perubahan struktur yang menemani pembangunan ekonomi sering disebut transformasi struktural (*structural transformation*). Chenery (1988) juga menyebutkan bahwa konsep transformasi struktural *demand*, perdagangan, produksi dan tenaga kerja merupakan karakteristik dari pembangunan.

Teori pola pembangunan Chenery memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Penelitian yang dilakukan Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri (Todaro dan Smith, 2000).

Tabel 2.1

Beberapa Cara Yang Digunakan Untuk Menunjukkan Perubahan Struktur Ekonomi Dalam Proses Pembangunan

Faktor-faktor yang dianalisa	Cara yang digunakan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi
I. PROSES AKUMULASI	
1. <i>Pembentukan modal</i> a. Tabungan domestik bruto b. Pembentukan modal domestik bruto c. Aliran masuk modal (di luar impor) 2. <i>Pendapatan Pemerintah</i> a. Pendapatan pemerintah b. Pendapatan dari pajak	Dengan melihat perubahan nilai-nilainya dan dinyatakan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)
3. <i>Pendidikan</i>	

Faktor-faktor yang dianalisa	Cara yang digunakan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi
a. Pengeluaran untuk pendidikan b. Tingkat pemasukan anak-anak ke sekolah dasar dan sekolah menengah	yang digunakan untuk pendidikan. Dengan menunjukkan perubahan persentase anak-anak yang bersekolah SD dan SMP
II. PROSES ALOKASI SUMBER-SUMBER DAYA	
<p style="text-align: center;">4. Struktur permintaan Domestik</p> <p>a. Pembentukan modal domestik bruto b. Konsumsi rumah tangga c. Konsumsi pemerintah d. Konsumsi atas bahan makanan</p> <p style="text-align: center;">5. Struktur produksi</p> <p>a. Produksi sektor primer b. Produksi sektor industri c. Produksi perusahaan utilities d. Produksi sektor jasa-jasa</p> <p style="text-align: center;">6. Struktur perdagangan</p> <p>a. Ekspor b. Ekspor bahan mentah c. Ekspor barang-barang industri a. d. Impor</p> <p style="text-align: right;">Dengan melihat perubahan nilai-nilainya dan dinyatakan sebagai persentase dari PDB</p>	
III. PROSES DEMOGRAFIS DAN DISTRIBUTIF	
<p style="text-align: center;">7. Alokasi tenaga kerja</p> <p>a. Dalam sektor primer b. Dalam sektor industri c. Dalam sektor jasa-jasa</p> <p style="text-align: right;">Dengan melihat perubahan jumlahnya dan dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja</p>	
<p style="text-align: center;">8. Urbanisasi</p> <p style="text-align: center;">Penduduk daerah urban</p> <p style="text-align: center;">9. Transisi Demografis</p> <p>a. Tingkat kelahiran b. Tingkat kematian</p> <p style="text-align: right;">Dengan melihat perubahan jumlahnya dan dinyatakan sebagai persentase dari total penduduk</p>	
<p style="text-align: center;">10. Distribusi pendapatan</p> <p>a. 20% penduduk yang menerima pendapatan paling tinggi</p> <p style="text-align: right;">Dengan melihat perubahan PDB yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan</p>	

Faktor-faktor yang dianalisa	Cara yang digunakan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi
b. 40% penduduk yang menerima pendapatan paling rendah	tersebut

Sumber : H.B. Chenery dan M. Syrquin, *Pattern of Development 1950-1970*, Oxford University Press, London 1975 dalam Sadono Sukirno (1985)

2.3. Teori Pembangunan Tak Seimbang dan Keterkaitan Antar Sektor

Salah satu karakteristik dalam pembangunan ekonomi adalah pergeseran jangka panjang populasi dan produksi dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan sektor jasa. Konsep strategi pembangunan berimbang (*balanced growth*), yaitu pembangunan di sektor primer (berbasis sumber daya alam) dan sektor industri secara bersamaan merupakan tujuan pembangunan yang paling ideal. Pada kenyataannya konsep strategi pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan oleh negara berkembang, hal ini dikarenakan sumber daya yang tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan di sektor primer maupun sektor industri sekaligus (Lynn, 2003). Selain itu Lynn juga menjelaskan, bahwa peran sentral sektor primer (pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan) dalam proses pembangunan ekonomi menyiratkan bahwa meningkatkan kehidupan petani akan meningkatkan dan menciptakan peluang bagi mereka untuk berperan di sektor jasa dan industri.

Teori pembangunan tak seimbang ini pertama kali dikemukakan oleh Hirschman dan Streeten dalam kritiknya terhadap teori pembangunan seimbang yang diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (*simultaneous*) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain atau teori ini bisa diartikan juga sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Menurut Hirschman konsep pembangunan seimbang tidaklah cocok bila diterapkan di NSB, karena NSB tidak akan sanggup melaksanakan program pembangunan seperti itu tanpa adanya bantuan dari luar, karena pelaksanaan pembangunan memerlukan tenaga-tenaga ahli yang besar sekali jumlahnya, yang notebene sangat terbatas sekali jumlahnya di NSB. Disamping itu konsep pembangunan seimbang ini apabila dilaksanakan bisa menimbulkan eksternalitas

disekonomis, karena dapat menghancurkan cara-cara bekerja masyarakat yang justru akan memberikan kerugian bagi masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan tak seimbang menurut Hirschman adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB. Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- 1) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang;
- 2) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, dan
- 3) pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (*bottleneck*) atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

Menurut Hirschman jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua periode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang dalam perkembangannya akan menghasilkan sektor pemimpin yang akan merangsang perkembangan sektor lainnya. Kemudian pembangunan tak seimbang ini dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di NSB karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumber daya. Dengan melaksanakan program pembangunan tak seimbang maka usaha pembangunan pada suatu periode waktu tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang terpengaruh di berbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Oleh karena itu sumber daya-sumber daya yang sangat langka itu dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan. Dalam pendapatnya Hirschman melakukan pengelompokan sektor-sektor perekonomian berdasarkan pengaruh kaitan ke belakang (*Backward Linkage*) dan pengaruh kaitan ke depan (*Forward Linkage*).

Selain Hirschman, beberapa penulis juga mengembangkan pendefinisian dalam mengukur efek keterkaitan antar sektor dalam perekonomian, yaitu Rasmussen (1956), Chenery dan Watanabe (1958), Yotopoulos dan Nugent (1973)

dan Jones 1976 (dalam Miller and Blair, 1985). Pengukuran kedua efek keterkaitan ini pada dasarnya untuk menentukan sektor unggulan dari suatu perekonomian, karena bila suatu sektor mempunyai efek keterkaitan ke depan dan ke belakang tinggi dibanding dengan sektor lainnya maka dapat menyimpulkan bahwa investasi di sektor tersebut akan memberi dampak yang lebih menguntungkan kepada perekonomian secara keseluruhan, bila dibandingkan dengan investasi pada sektor-sektor yang efek keterkaitan ke depan dan ke belakang yang lebih rendah.

Selain mempengaruhi produksi secara keseluruhan di dalam perekonomian, keterkaitan antar sektor juga akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (efek keterkaitan tenaga kerja) dan pendapatan (efek keterkaitan pendapatan). Hal ini terjadi karena untuk memproduksi output di sektor tersebut dibutuhkan tenaga kerja dan tenaga kerja tersebut akan mendapatkan tambahan pendapatan dari kegiatan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian tidak hanya akan mempengaruhi hasil produksi di dalam sektor-sektor perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja dan pendapatan di dalam perekonomian secara keseluruhan.

2.4. Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan

Secara umum sumber daya alam diklasifikasikan atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non renewable resource*) dan sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable resource*). Pengelolaan sumber daya alam sangat ditentukan oleh sikap mental dan cara pandang manusia terhadap sumberdaya alam tersebut, Pandangan yang konservatif (pandangan pesimis atau Malthusian) terhadap sumber daya alam menyebabkan sikap yang sangat berhati-hati dalam memanfaatkan sumberdaya alam karena manusia dihadapkan pada ketidakpastian masa depan. Pandangan ekstrim lain adalah pandangan eksploratif (perspektif Ricardian), dalam perspektif ini sumber daya alam adalah *the engine of growth* atau mesin pertumbuhan (Rustiadi, Saefulhakim&Panudju, 2009).

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan tidak saja menghasilkan produk seperti kayu, arang, tanaman obat-obatan, sumber air dan lain-lain tetapi juga menjadi sumber habitat bagi satwa dan hewan lainnya yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dengan kata lain hutan tidak saja memberikan manfaat pada saat mereka ditebang namun juga memberikan manfaat tatkala sumberdaya ini dibiarkan atau tidak dieksploitasi yang sering disebut manfaat konservasi (Akhmad, 2004). Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi, kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu terbentuk alamiah dan buatan. Perkembangan teknologi telah menciptakan teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam, dengan dasar tersebut pengelolaan hutan lebih dititikberatkan kepentingan secara menyeluruh. Bumi dengan segala macam didalam dan di permukaan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.

Peranan sektor kehutanan selain sebagai penyedia bahan baku bagi industri pengolahan kayu juga berperan sebagai penyedia oksigen, plasma nutfah, sumber air dan penyeimbang lingkungan hidup. Sumber kekayaan hutan harus bisa dirasakan manfaatnya bagi generasi sekarang dan diwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Dengan demikian adalah penting untuk membangun kebijakan ekonomi, ekologi dan kebutuhan sosial dengan cara sinergis yang mana mereka saling menguatkan satu sama lain. Pembangunan hutan selalu terkait dengan pembangunan berkelanjutan, karena pembangunan dan pengelolaan hutan mempunyai dimensi waktu yang panjang lintas generasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk

mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan mereka.

Walaupun terdapat keanekaragaman penafsiran oleh para pakar dalam bidang pengelolaan hutan tentang konsep pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*) akan tetapi telah disepakati bahwa dalam pengelolaan hutan lestari perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip kelestarian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Dalam Informasi Umum Kehutanan (Dephut 2002) Pengelolaan hutan sebagai bagian dari pembangunan wilayah masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait. Permasalahan tersebut antara lain terjadinya banjir, erosi, kekeringan, degradasi lahan, belum adanya keterpaduan antar sektor dan antar instansi, dan kesadaran masyarakat yang rendah tentang pelestarian manfaat sumberdaya alam.

Pembangunan kehutanan ke depan harus bisa memecahkan permasalahan- permasalahan tersebut dengan peluang-peluang yang ada. Peluang yang paling memungkinkan dalam menghadapi permasalahan yang kompleks tersebut adalah dengan meningkatkan pengelolaan hutan dalam konteks pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu.

(Helma 1999 dalam Kay (2003) mengatakan pengelolaan hutan adalah praktek penerapan prinsip-prinsip biologi, fisika, kimia, analisis kualitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam mempermudah, membina, memanfaatkan dan mengkonversikan lahan hutan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran tertentu dengan tetap mempertahankan produktivitasnya. Pengelolaan hutan mencakup kegiatan-kegiatan pengelolaan terhadap keindahan, rekreasi, satwa liar, kayu serta hasil hutan bukan kayu lainnya dan manfaat lain yang dapat diperoleh dari hutan.

Sektor kehutanan memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi, peningkatan kesejahteraan petani hutan atau pengentasan kemiskinan bagi masyarakat sekitar hutan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi Indonesia, nilai fungsi hutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan revitalisasi hutan. Pengembangan sektor kehutanan akan dapat diwujudkan jika sektor kehutanan dengan nilai multifungsinya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan .

Menurut Simangunsong (2004), bahwa kehutanan dan industri pengolahan kayu merupakan sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian. Peranan sektor kehutanan dalam perekonomian nasional tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap pertumbuhan pendapatan nasional, kesempatan kerja, tetapi potensinya juga harus dilihat sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan *output* dan diversifikasi produksi di sektor-sektor ekonomi.

2.5 Gambaran Kinerja Pembangunan Kehutanan di Indonesia

2.5.1. Luas Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Luas Kawasan Hutan di Indonesia berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 2000 seluas **120,35** juta hektar atau sebesar **62,6%** dari total luas daratan Indonesia seluas 192,16 juta ha. Kawasan

hutan tersebut dibagi dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Luas kawasan hutan di Indonesia untuk 23 Propinsi belum termasuk propinsi Sumut, Riau dan Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Luas Kawasan Hutan Indonesia berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan untuk 23 Propinsi

Fungsi Hutan	Luas Daratan	Luas Perairan	Jumlah (Juta)
Hutan Konservasi	18,15	5,07	23,21
Hutan Lindung	29,04	-	29,04
Hutan Produksi Tetap	27,82	-	27,82
Hutan Produksi Terbatas	16,21	-	16,21
Hutan Produksi Konversi	13,67	-	13,67
Total	104,89	-	109,96
<i>Sumber : Statistik Kehutanan 2004, Departemen Kehutanan</i>			

Pembangunan kehutanan secara langsung berada dalam koordinasi Bidang Ekonomi dengan agenda *Triple Tracks Strategis Economic Development* Kabinet Indonesia Bersatu yaitu *pro growth, pro job, dan pro poor*. *Pro growth with equity* dilaksanakan disegala sektor, termasuk di sektor kehutanan (hutan dan produk kehutanan). Agenda pertumbuhan ekonomi dibidang kehutanan dilaksanakan melalui peningkatan investasi dan ekspor hutan dan produk kehutanan. Investasi di hutan dan produk kehutnan dimasa krisis keuangan global saat ini masih tumbuh (*green shot*) melalui usaha pemamfaatan hutan produksi berupa Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan Izin Usaha Industri Kayu Primer (IUIKP) seperti (*plywood, sawn timber, wood working* berbasis kayu rakyat

Pemanfaatan hutan secara komersial di Indonesia terutama di hutan alam, yang dimulai sejak tahun 1967 telah menempatkan kehutanan sebagai penggerak perekonomian nasional. Indonesia telah berhasil merebut pasar ekspor kayu tropis dunia yang diawali dengan ekspor kayu log, kayu gergajian, kayu lapis dan

produk kayu lainnya. Selama 1992-1997 tercatat devisa sebesar US\$ 16,0 milyar dengan kontribusi terhadap PDB termasuk industri kehutanan rata-rata sebesar 3,5% (BPS dalam Renstra Dephut, 2010).

Pada tahun 2003 ekspor kehutanan secara resmi dilaporkan sejumlah US\$ 6,6 milyar atau sekitar 13,7 % dari nilai seluruh ekspor non migas. Ekspor tersebut terdiri dari kayu lapis, kayu gergajian dan kayu olahan sebesar US\$ 2,8 milyar, pulp and paper sebesar US\$ 2,4 milyar dan furniture sebesar US\$1,1 milyar dan sisanya berasal dari kayu olahan lainnya. Tetapi menurut perkiraan karena tidak tercatat seluruhnya jumlah tersebut dapat mencapai lebih dari US \$ 8,0 milyar (CIFOR, 2003).

Menurut Simangunsong (2004) kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan produksi kayu dianggap menjadi pendorong dalam perkembangan industri kayu nasional hingga memiliki posisi penting terhadap pasar internasional. Rangkaian kebijakan tersebut antara lain kebijakan larangan ekspor kayu bulat yang dimulai tahun 1980 secara bertahap dan berlaku penuh pada tahun 1985, pajak ekspor yang tinggi terhadap kayu gergajian yang berlaku mulai Nopember 1989, pencabutan kebijakan larangan ekspor bulat dan menggantinya dengan pajak ekspor yang tinggi (*prohibitive export tax*) terhadap kayu bulat yang berlaku mulai tahun 1992, menurunkan pajak ekspor kayu bulat menjadi maksimum 10% sebelum akhir Desember 2000 dan 0 % pada tahun 2003 telah berhasil meembangkan industri kayu lapis dan kayu gergajian di Indonesia serta merubah Indonesia dari eksportir kayu bulat terbesar di dunia menjadi eksportir utama kayu olahan sehingga sektor kehutanan telah menjadi salah satu sektor andalan penghasil devisa bagi negara dan sekaligus merupakan kontributor yang sangat berarti terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun dipihak lain kebijakan-kebijakan tersebut telah melahirkan kesenjangan antara kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh industri kayu olahan dengan kemampuan menyediakan pasokan bahan baku tersebut. Kondisi ini dianggap sebagai pemacu makin maraknya penebangan ilegal (*illegal logging*), yang berusaha memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri pengolahan kayu yang tidak dapat dipenuhi oleh jalur penebangan legal.

Namun masa keemasan industri kehutanan mulai tahun 1990 mengalami penurunan. Hal ini digambarkan antara lain dengan penurunan jumlah unit pengusaha hutan (HPH) dari 560 unit (tahun 1990) dengan ijin produksi 27 juta m³ menjadi 270 unit HPH (tahun 2002) dengan ijin produksi 23,8 juta m³. Penurunan berlanjut pada tahun 2003 dengan ijin produksi 6,8 juta m³ dan tahun 2004 dengan ijin produksi 5,8 juta m³. Sedangkan realisasi total produksi kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis dari berbagai sumber produksi tahun 1991 - 2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

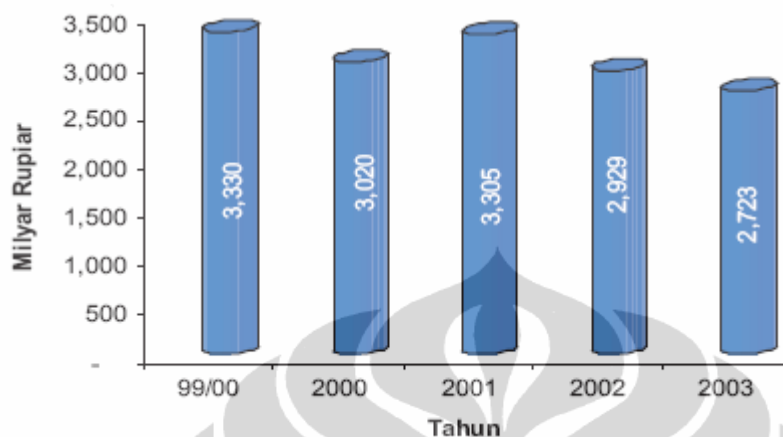
Tabel. 2.3 Realisasi Produksi Kayu tahun 1991-2008

No	Tahun	Kayu Bulat (m ³ /cum)	Kayu Gergajian (m ³ /cum)	Kayu Lapis (m ³ /cum)
1	2	3	4	5
1	1991/1992	23.892.000	3.006.046	9.123.500
2	1992/1993	28.267.000	3.534.356	9.874.000
3	1993/1994	26.828.011	2.244.000	9.924.000
4	1994/1995	24.027.277	1.729.839	8.066.400
5	1995/1996	24.850.061	2.014.193	9.122.401
6	1996/1997	26.069.282	3.565.475	10.270.230
7	1997/1998	29.520.322	2.613.452	6.709.836
8	1998/1999	19.026.944	2.707.221	7.154.729
9	1999/2000	20.619.942	2.060.163	4.611.878
10	2000 *)	13.798.240	2.789.543	4.442.735
11	2001	11.432.501	674.868	2.101.485
12	2002	9.004.105	623.495	1.694.405
13	2003	11.423.501	762.604	6.110.556
14	2004	13.548.938	432.967	4.514.392
15	2005	24.222.638	1.471.614	4.533.749
16	2006	21.792.144	679.247	3.811.794
17	2007	31.491.585	587.402	3.454.350
18	2008	31.964.442	530.688	3.353.479

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Seiring dengan terus menurunnya kemampuan produksi kayu bulat dari hutan alam, maka PNBK Kehutanan pun mengalami penurunan, yaitu rata-rata sekitar 18% per tahun selama kurun waktu 2004-2007. PNBK Kehutanan pada Tahun 2007 sebesar Rp 2,035 Trilyun. Hal ini dapat dipahami mengingat pasokan bahan baku kayu semakin bertumpu pada hutan tanaman yang tidak dipungut Dana Reboisasi (DR), sehingga total PNBK menurun. Penerimaan pemerintah dari pungutan Dana Reboisasi (DR), Bunga Jasa Giro DR, Provisi Sumber Daya hutan (PSDH), Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Ekspor Satwa Liar, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan

dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam dan Iuran Usaha Pariwisata Alam pada tahun 1999 mencapai Rp. 3,33 trilyun, dan pada tahun 2003 menurun menjadi Rp. 2,72 trilyun.



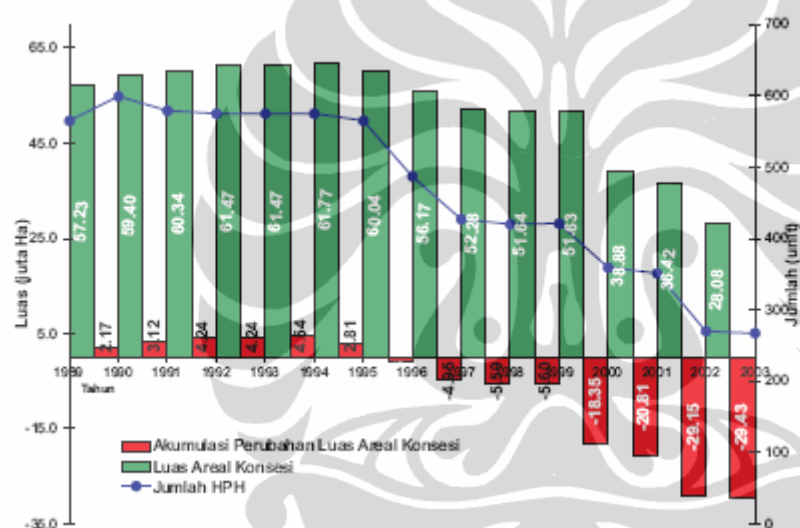
Gambar. 2.1 Grafik Perkembangan PNBK Kehutanan

Tabel 2. 4 Perkembangan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

No	Tahun	Rotan (ton)	Gondoruken (ton)	Damar (ton)	Terpentin (ton)	Sagu (ton)	Sutera (Kg)	Kopal (ton)
1	1996/1997	51.564	53.736	1.556	10.294	0	9677	821
2	1997/1998	32.399	69.658	6.423	13.700	3944	13440	764
3	1998/1999	62.644	43.785	7.887	7.632	1479	13279	516
4	1999/00	38.417	24.025	6.310	2.667	585	1911	114
5	2000	94.752	-	3.342	-	114	-	647
6	2001	23.836	580	2.921	-	-	-	428
7	2002	17.779	-	1.131	544	-	-	442
8	2003	127.295	4.592	4.401	7.684	-	-	403
9	2004	188.051	38.435	2.723	36.958	-	-	318
10	2005	221.381	27.098	9.131	5.152	-	-	320
11	2006	24.554	3.210	11.087	-	-	-	149
12	2007	3.153	850	648	-	-	-	-
13	2008	132.579	-	24.867	-	-	-	-

Sumber: Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Ket. (-) = tidak ada data

Pemanfaatan hutan dari tahun 1989 sampai dengan 2003 menunjukkan penurunan baik luasan areal dan jumlah unit pengusahaannya. Jumlah unit pengusahaan hutan pada tahun 2003 tercatat 267 unit atau menurun sebesar 52,1 % dibandingkan pada tahun 1989 (Dephut, 2006). Sementara jumlah industri pengolahan kayu sampai dengan tahun 2003 tercatat total mencapai 1881 unit dengan rincian: 1.618 unit sawmill dengan kapasitas 11.048 juta m³; 107 unit plymill dengan kapasitas 9,43 juta m³; 6 unit industri pulpmill dengan kapasitas 3,98 juta m³, 78 industri blockboard dengan kapasitas 2,08 juta m³ dan 73 unit industri pengolahan kayu lainnya dengan kapasitas 3,15 juta m³.



Gambar. 2.2 Perkembangan Ijin Pemanfaatan Hutan

Walaupun demikian penurunan kontribusi industri kehutanan diimbangi dengan peningkatan hasil hutan bukan kayu. Kontribusi hasil hutan bukan kayu (rotan, arang dan damar) tahun 1999 tercatat US\$ 8,4 juta dan pada tahun 2002 meningkat menjadi US\$ 19,74 Juta. Sedangkan kontribusi perdagangan satwa dan tumbuhan pada tahun 1999 sebesar US \$ 61,3 ribu, meningkat tajam pada tahun 2003 menjadi US\$ 3,34 juta.

Agenda penghapusan/pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) diarahkan pada pemberian akses dan pengakuan legal atas usaha pemanfaatan Hutan Produksi melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan sekitar hutan. Peranan sektor kehutanan dalam

penurunan kemiskinan dilaksanakan dalam koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui pemberian akses hukum ke pemamfaatan hutan dan pembiayaan yang luas dalam program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan penyaluran dana bergulir (*revolving funds*) melalui Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sejak 2007. Selain itu, peningkatan program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di dalam/di sekitar hutan seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPTK), Industri Kayu Berbasis Hutan Rakyat, Bina Desa Hutan dan Desa Konservasi Hutan terus dilakukan secara bertahap dan konsisten.

Tentu saja peran hutan dan produk kehutanan dalam penurunan kemiskinan diatas tidak lepas dari program-program pro rakyat pada 2004-2009 seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai usaha pemerintah dalam kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi disertai distribusi pendapatan (*growth with equity*).

Agenda penyediaan lapangan kerja (*pro-job*) dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi di perkotaan (sektor riil) berupa industri perkayuan dalam rangka menyerap tenaga kerja. Keberhasilan dalam peningkatan investasi dan ekspor hasil hutan sebagai wujud pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan diatas, sekaligus juga memberikan sumbangan pada lapangan pekerjaan di hutan dan produk kehutanan berupa kayu, hasil hutan bukan kayu (rotan, getah, biji dan lainnya) dan jasa lingkungan hutan (ekowisata, keanekaragaman hayati, perdagangan karbon) baik dalam skala besar maupun skala mikro dalam wujud bergeraknya ekonomi kreatif di pedesaan maupun perkotaan yang menggunakan bahan baku kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan wisata alam berbasis keanekaragaman budaya lokal.

Selain itu, peranan sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional dapat dilihat peranannya pada penyediaan lapangan kerja, dimana peranan sektor kehutanan merupakan salah sektor lapangan usaha yang menyerap angkatan kerja cukup besar. Pada tahun 2000, penyerapan tenaga kerja pada sektor kehutanan mulai dari penanaman, pemanfaatan sampai dengan industri

tercatat 3.092.470 orang, dengan rata-rata pendapatan pekerja di HPH sebesar Rp. 7,3 juta/tahun/orang, dan untuk di industri Rp. 3,3 juta/tahun/orang (BPS, 2000).

Pembangunan kehutanan sejauh ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil melalui ketersediaan jalan HPH bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat.

2.5.2 Isu-Isu Kerusakan Hutan

Banyak faktor yang menjadi penyebab kerusakan hutan di Indonesia, diantaranya adalah pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian hutan, kebakaran hutan, konversi hutan, perladangan berpindah, penebangan liar dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan bahan baku kayu bagi industri pengolahan kayu dalam negeri.

Dari faktor-faktor tersebut, dua faktor terakhir lah yang dianggap faktor yang paling serius (ITTO 2001). Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Kartodihardjo dan Supriono dalam Simangunsong (2004) yang menyatakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia yang sangat serius saat ini, khususnya hutan alam produksi, disebabkan oleh berbagai faktor. Selain karena praktek-praktek HPH tidak lestari dan kegiatan penebangan liar (illegal logging), pembangunan Hutan Tanaman Industri bersama-sama dengan pembangunan perkebunan, juga menjadi penyebab dikonversinya hutan alam. Holmes, 2000 dalam Simangunsong (2004) memperkirakan laju kerusakan hutan rata-rata antara tahun 1985 sampai 1998 adalah sebesar 1,7 juta hektar per tahun. Laju ini meningkat menjadi 2,0 juta hektar pada tahun 2000 (FWI/GFW, 2002).

Apabila mengacu pada definisi penebangan liar (illegal logging) seperti yang dinyatakan dalam ITTO (2001), yaitu pemanenan kayu yang melawan hukum dan peraturan, maka kayu bulat ilegal yang dikonsumsi oleh industri pengolahan kayu, dapat dikategorikan sebagai kayu bulat hasil kegiatan penebangan liar.

2.5.3. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan.

Proses degradasi sumberdaya hutan dalam waktu \square 20 tahun ini telah menimbulkan dampak yang cukup luas, yang menyentuh aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan juga sosial-politik. Kerusakan telah terjadi di semua kawasan hutan sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum, pembukaan hutan untuk keperluan pembangunan lain (pertambangan, dan industri), perambahan, kebakaran hutan, lemahnya kesadaran dan perhatian terhadap kelestarian ekosistem DAS, serta kurangnya upaya reboisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengguna hutan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis data RePPPProt dan data Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) tahun 1985-1997 diperoleh angka deforestasi sebesar 22,46 juta ha atau laju deforestasi nasional per tahun sebesar 1.8 juta ha/tahun. Deforestasi terbesar terjadi di Propinsi Sumatera Selatan seluas 2,3 juta ha atau sebesar 65 % dari luas hutannya pada tahun 1985. Kemudian secara berturut turut di Propinsi Kalimantan Selatan, Lampung dan Jambi. Namun Demikian deforestasi terluas terjadi di Pulau Kalimantan seluas 10,3 juta ha, yaitu di Propinsi Kaltim 4,4 juta ha, Propinsi Kalteng 3,1 juta ha, Propinsi Kalbar 2,0 juta ha dan Propinsi Kalsel seluas 0,8 juta ha

Laju kerusakan tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Kebijakan pembangunan hutan tanaman melalui konversi hutan alam yang belum diikuti dengan penyiapan sumber daya yang baik telah mengakibatkan terlantarnya rencana penanaman sementara pemanfaatan konversi hutan alam melalui IPK berjalan dengan cepat. Hal ini telah memberikan kontribusi terbesar untuk terciptanya lahan kritis. Produksi kayu dari IPK selama 5 tahun terakhir sebesar 92,6 juta m³. Seiring dengan kondisi tersebut, keberhasilan pembangunan hutan tanaman dinilai belum sesuai dengan rencana. Dari 9,2 juta ha yang direncanakan hingga tahun 2001 baru terealisasi 2,3 juta ha.
- b. Kesenjangan *supply-demand* bahan baku industri, dimana kapasitas industri terpasang sekitar 58,24 juta m³ sedangkan kemampuan lestari hutan adalah

sekitar 25,4 juta m³. Disamping itu kebijakan di masa lalu pembukaan kran ekspor kayu bulat yang belum diikuti dengan kesiapan instrumen *Informasi Umum Kehutanan - 2002* 17 pengendaliannya telah mengakibatkan terbukanya pasar gelap yang bersumber dari kayu illegal logging.

- c. Kebakaran hutan tahun 1997/1998 menyebabkan hilangnya 4,8 juta hektar kawasan hutan. Walaupun upaya pencegahan kebakaran hutan telah dilaksanakan secara terus menerus dalam berbagai upaya, namun hasilnya belum optimal. Setiap tahun masih selalu terjadi kebakaran hutan antara 0,1 – 0,25 juta ha.
- d. Masyarakat di sekitar hutan belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan hutan dan bahkan sebagian termarginalkan akibat sebagian pola pembangunan hutan cenderung tidak mendorong peran serta masyarakat. Kecemburuan akan peran serta di dalam pembangunan kehutanan dan faktor kemiskinan telah mendorong proses pemanfaatan masyarakat oleh intelektual illegal logger. Disamping itu pola slash and burn dalam membuka lahan untuk pertanian dan perkebunan mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang dari tahun ke tahun terus meningkat.
- e. Tatanan sistem pemerintahan yang semula sentralistis telah berubah menjadi desentralisasi yang memberikan penekanan otonomi urusan di bidang kehutanan belum sepenuhnya diikuti dengan peraturan dan ketentuan di daerah.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Nur Arifatul Ulya dan Syafrul Yunardi (2004) yang menganalisis peranan sektor kehutanan dalam perekonomian Indonesia dengan menggunakan analisa input output berdasarkan tabel I-O 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan baik terhadap output maupun permintaan akhir merupakan yang terkecil bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Namun perannya dalam memberikan nilai tambah merupakan sektor kedua terbesar setelah sektor pertanian tanaman pangan.

Penelitian Erni Wulandari (2006) yang menganalisis dampak industri pengolahan kayu terhadap perekonomian Riau dengan menggunakan pendekatan Input-Output model Miyazawa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak industri pengolahan kayu terhadap perekonomian cukup besar baik dalam pembentukan output dan nilai tambah bruto. Sedangkan analisis keterkaitannya menunjukkan sektor industri pengolahan kayu di Propinsi Riau memiliki indeks keterkaitan ke depan yang lebih kecil daripada indeks keterkaitan kebelakang, sedangkan kontribusinya dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan masih sangat kecil dikarenakan sektor industri kayu masih sedikit dalam menyerap tenaga kerja dari kelompok rumah tangga berpendapatan rendah.

Penelitian Yetty Intan Rouli (2005) tentang *Peranan Industri Pulp Dalam Perekonomian dan Distribusi Pendapatan di Propinsi Riau (Pendekatan Model Miyazawa)* yang menunjukkan peranan industri pulp dalam perekonomian Riau (tanpa migas) tidak begitu besar, baik dalam penciptaan pendapatan rumah tangga dan output. Berdasarkan analisa keterkaitan dengan menggunakan model tabel input output Miyazawa diperoleh kesimpulan bahwa dengan melihat daya penyebaran ke sektor-sektor dalam perekonomian maka sektor rumah tangga perkotaan yang paling banyak menggunakan output industri pulp dibandingkan dengan rumah tangga pedesaan. Sedangkan derajat kepekaan (keterkaitan ke depan) industri pulp antara kelompok pendapatan baik pedesaan maupun perkotaan dianggap tidak ada.

Penelitian Indartik dan Elvida Yosefi (2008) dalam Jurnal Sosial dan Ekonomi Kehutanan yang diberi judul *Peranan Industri Berbasis Kayu Dalam Perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah* menunjukkan bahwa kontribusi industri berbasis kayu khususnya industri penggergajian kayu dan kayu awetan cukup besar dalam menciptakan output di Propinsi Kalimantan Tengah, Industri berbasis kayu merupakan sektor unggulan dilihat dari indeks *forward linkage* dan *backward linkage* yang lebih besar dari 1 (satu) dan berdasarkan nilai pengganda output sektor industri bahan bangunan dari kayu memiliki nilai pengganda paling tinggi, sedangkan dari angka pengganda pendapatan dan tenaga kerja di sub sektor

kehutanan, industri penggergajian kayu dan kayu awetan memiliki angka pengganda pendapatan dan tenaga kerja paling tinggi.

Penelitian Mitsuhiro Hayashi (2004) yang diberi judul *Structural Change In Indonesian Industry And Trade : An Input-Output Analysis* ini mempelajari perubahan struktur dalam perekonomian sebelum dan sesudah krisis ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode analisis input output. Mitsuhiro Hayashi mengevaluasi pencapaian industrialisasi di Indonesia dan mengklarifikasi apa perubahan utama untuk keberlangsungan industrialisasi. Setelah menelusuri sejarah pembangunan di Indonesia, perubahan industri dan perdagangan antara 1995 dan 2000 digambarkan dengan menggunakan analisis *skyline charts*, analisis keterkaitan industri (*industrial linkage analysis*), dan analisis dekomposisi faktor pertumbuhan.

Siregar (2000), dengan menggunakan model Input-Output mengestimasi kesempatan kerja yang tercipta oleh ekspor pertanian dari data Input Output Indonesia 1990 dan 1995. Hasil estimasi menunjukkan bahwa meskipun pengganda kesempatan kerja sektor pertanian relatif tinggi, kesempatan kerja yang ditimbulkan oleh ekspor pertanian sangat kecil jika dibandingkan dengan yang ditimbulkan oleh ekspor non-pertanian karena ekspor pertanian sangat rendah. Relatif rendahnya ekspor pertanian dapat dimengerti karena para penentu kebijaksanaan ketika itu agaknya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat hanya dapat dicapai dengan memacu ekspor non-pertanian, terutama ekspor manufaktur. Karena sektor-sektor pertanian memiliki pengganda kesempatan kerja relatif tinggi dan ternyata lebih tahan terhadap kejutan dari luar, seperti yang terjadi selama krisis ekonomi sejak tahun 1997, maka upaya peningkatan ekspor pertanian seharusnya tidak diabaikan terutama dalam rangka perluasan kesempatan kerja.

Penggunaan model I-O tidak hanya sebatas menggambarkan keterkaitan antar sektor saja. Model I-O juga bisa dipakai untuk menganalisis bagaimana terjadinya perubahan struktur perekonomian di suatu negara atau wilayah, seperti yang dilakukan oleh Amir dan Nazara (2005). Studinya dilakukan untuk perekonomian Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis *Multiplier*

Product Matrix (MPM). MPM ini merupakan suatu instrumen yang dikembangkan untuk melihat dampak suatu sektor secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Selain itu MPM ini bisa juga memotret pengaruh suatu sektor berdasarkan *backward linkage* dan *forward linkage*, yang sekaligus pula bisa menjelaskan hubungan antara suatu sektor dengan sektor-sektor lainnya. Dari hasil pengamatannya, kelihatan bahwa terjadinya perubahan struktur perekonomian di Jawa Timur selama periode 1994 sampai 2000 telah terjadi perubahan struktur ekonomi walaupun tidak drastis. Hal ini ditunjukkan oleh *visualisasi economic landscape* dari nilai *Multiplier Product Matrix* (MPM) tahun 1994 dan 2000. Selain itu juga telah terjadi pergeseran dalam beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral. Peranan sektor industri lainnya dan sektor industri makanan, minuman dan tembakau sangat dominan dari sisi besaran outputnya, juga memiliki angka pengganda yang cukup tinggi.

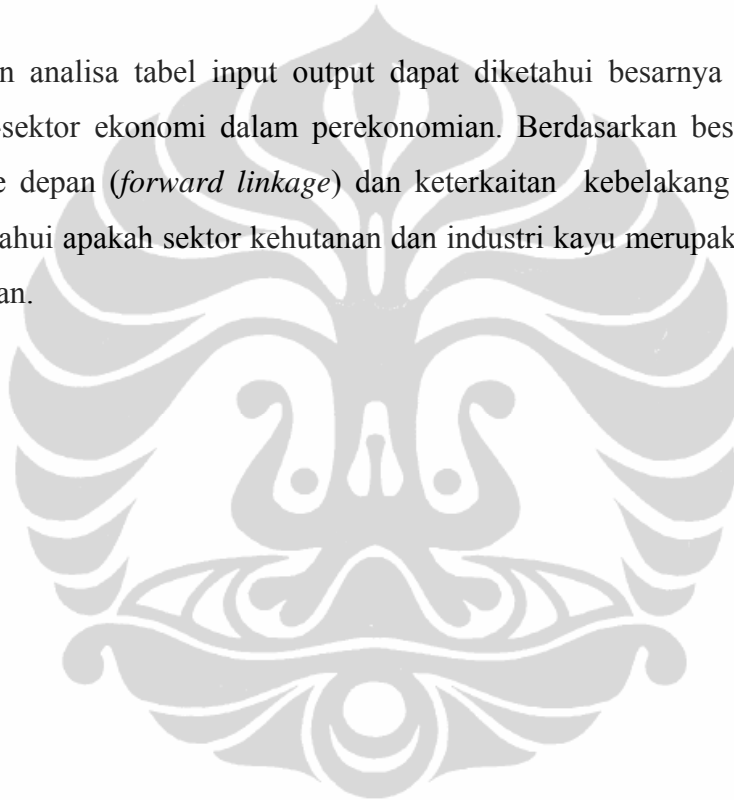
2.7 Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi secara umum yang dilaksanakan ada skala prioritas yang ditentukan antara lain untuk : meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan. Model pembangunan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan sektoral. Pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator ekonomi yang ada, salah satunya menggunakan PDB atau PDRB. Pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk memperkokoh struktur ekonomi dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor dengan melihat sektor-sektor yang menjadi unggulan.

Dengan melihat segala kondisi dan permasalahan yang ada khususnya dalam pembangunan kehutanan secara nasional, maka dalam perencanaan pembangunan kehutanan khususnya dan pembangunan nasional umumnya perlu ditentukan sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan bisa dijadikan prioritas pelaksanaan pembangunan kehutanan agar perencanaan pembangunan tersebut dapat lebih terarah. Prioritas sektor tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk menentukan prioritas jangka pendek dan jangka panjang

ini digunakan alat analisis model input output (I-O) yang menitikberatkan pada prioritas sektor pada perekonomian. Penentuan prioritas sektor dengan menggunakan alat analisis model I-O ini akan dijabarkan pada perhitungan pada pengganda output, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja, keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), dan untuk melihat perubahan struktur perekonomian melalui keterkaitan antar sektor ekonomi dengan membandingkan MPM (*Multiplier Produk Matrix*) kondisi dua tahun yang berbeda.

Dengan analisa tabel input output dapat diketahui besarnya keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian. Berdasarkan besaran angka keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) diketahui apakah sektor kehutanan dan industri kayu merupakan sektor – sektor unggulan.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

